



EVALUASI SENSUS EKONOMI 2026 & PENGUATAN KELEMBAGAAN BPS

Mengawal Akurasi Data untuk
Cetak Biru Ekonomi Nasional



Dr. Ling. Drs. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Anggota Komisi X DPR RI - Fraksi PKS

Memotret Urat Nadi Ekonomi Indonesia

10

Tahun
(Siklus Pendataan)

38

Provinsi

514

Kabupaten/Kota



Pendataan
Lapangan
(Mei - Agt 2026)

Pemeriksaan
& Penyisiran
Anomali

Pengolahan
Data Final

Fokus Baru: Adaptasi Perekonomian Modern



Ekonomi Digital

Memetakan e-commerce, bisnis online, hingga creator economy.



UMKM Informal

Menelusuri usaha tanpa izin resmi untuk memetakan ekonomi riil secara utuh.



Ekonomi Lingkungan

Mengukur karakteristik usaha dan dampaknya pada keberlanjutan.

Anatomi Pendataan: Ruang Lingkup & Metode Hibrida



Termasuk Didata (Non-Pertanian)

Industri pengolahan,
pertambangan, perdagangan,
perhotelan, kreator, dan jasa.



Pengecualian

Pertanian/Kehutanan (Sensus 2023),
Administrasi Pemerintahan, Aktivitas
murni rumah tangga.



CAWI (Web Interviewing)

Pengisian mandiri secara online
untuk usaha Menengah & Besar.



CAPI (Personal Interview)

Kunjungan door-to-door dengan
perangkat digital untuk usaha
Mikro & Kecil.

Evaluasi Lapangan (Kuartal III 2026): Mengurai Hambatan



Kendala Akses & Mobilitas

Tingginya penolakan di kawasan perumahan elite dan perusahaan besar.

Mobilitas pimpinan perusahaan memaksa penjadwalan ulang yang menguras waktu.



Miskonsepsi Pungutan Pajak

Ketakutan klasik pelaku usaha bahwa data sensus akan memicu pemeriksaan pajak.

Petugas di lapangan menguras energi ekstra untuk meyakinkan publik terkait kerahasiaan data.

Urgensi Data: Mitos vs. Realita (Refleksi Evaluasi Samarinda)

 **MITOS:** Data digunakan untuk penarikan pajak.

 **FAKTA:** Dijamin rahasia oleh UU No. 16/1997 & murni untuk navigasi kebijakan.

Data Bebas Anomali → Data Tunggal (DTSEN)



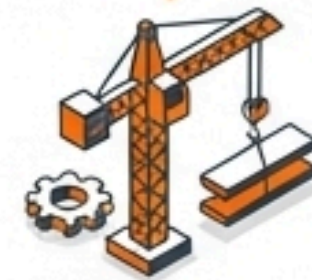
Akurasi Bansos

Menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) agar tepat sasaran.



Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemetaan rantai pasok dan kelayakan penerima.



15 Proyek Raksasa Nasional

Pijakan fundamental eksekusi program.

Strategi Komisi X: Agenda Legislasi Prioritas

SATU DATA INDONESIA

Percepatan RUU Statistik

(Target 2026).
Menjadikan BPS
lebih sentral,
independen &
adaptif.

Evolusi Peran

Transformasi
fungsi
kelembagaan di
tengah disrupsi
teknologi.

Literasi Publik

Kampanye masif
mengatasi
resistensi &
mendorong
partisipasi jujur.

Kapasitas Teknis

Pemenuhan
anggaran
operasional &
SDM hingga level
Kabupaten/Kota.

BPS di Era Disrupsi: The Guardian of Data



Di era disrupsi Kecerdasan Buatan (AI), BPS tidak boleh sekadar menjadi 'pengepul data'.



Menjaga Kebenaran (Integritas): Melindungi basis data nasional dari ancaman manipulasi dan misinformasi sintetik.



Otoritas Tunggal: Bertransformasi menjadi wasit kebenaran data yang objektif, independen, dan tak terbantahkan.

Sinergi Menuju Cetak Biru Ekonomi Nasional



“Kebijakan yang hebat tidak lahir dari asumsi, melainkan dari fakta faktual di lapangan. Bersama, kita memastikan arah ekonomi negara tidak salah sasaran.”